

Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris

Istato Hidayana¹, Nurhadi²

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengungkap pemaknaan anggota rumah tangga miskin terhadap kesejahteraan dan kemiskinan mereka. Tulisan ini mendasarkan pada teori kemiskinan kultural yang memandang adanya seperangkat budaya yang menyebabkan masyarakat miskin sulit lepas dari kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif induktif (eksploratori) melalui pendekatan fenomenologi dengan analisis deskriptif. Temuan penting penelitian ialah masyarakat miskin memaknai kesejahteraan (wellbeing) tidak secara tunggal dan bersifat gradual yaitu (i) memiliki fisik yang sehat, (ii) hubungan relasional yang harmonis dengan warga masyarakat dan (iii) kecukupan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar utamanya kebutuhan pangan. Terdapat dualisme pandangan atas kemiskinan, antara menerima sebagaimana dalam falsafah "nrimo ing pandum" dan menolak atas kondisi kemiskinan sekalipun tidak mengetahui jalan keluarnya.

Kata kunci: kemiskinan kultural; kemiskinan pedesaan; *participatory poverty assessment*

Abstract

This article aims to reveal how the members of the poor family perceive wellbeing and poverty. This article is based on the theory of cultural poverty which sees the existence of a set of cultures that cause poor people difficult to escape from poverty. The research method used is qualitative inductive (exploratory) through phenomenology approach and data analysis uses descriptive analysis. The important finding of the study is that the poor perceived wellbeing as multiple and gradual i.e. (i) have healthy physical, (ii) a harmonic relation with others in communities and (iii) have enough money to meet the basic needs, especially, food. There is a dualistic view of poverty, between they accept as in the philosophy of "nrimo ing pandum" and they reject the conditions of their poverty although they do not know the way out.

Keywords: *cultural poverty; rural poverty; participatory poverty assessment*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, multidimensi dan dinamis yang dialami secara global sampai dengan hari ini. Dokumen rencana pembangunan global Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terbaru, *Sustainable Development Goals* (SDGs) masih menempatkan penurunan tingkat kemiskinan sebagai target pembangunan terdepan. Tidak tanggung-tanggung, PBB menetapkan target untuk mengurangi 50 juta orang miskin setiap tahunnya di dunia dalam rangka mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030. Menurut data estimasi terkini dari Bank Dunia (Oktober 2016), terdapat 10,7 persen atau 767 juta penduduk dunia yang hidup di bawah 1,9 US\$ per hari. Tidak jauh berbeda di Indonesia, tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 1980 sebesar 28,56 persen hingga menjadi 15,08

persen pada tahun 1990 hingga pada 11,13 persen pada tahun 2015 (BPS, 2016).

Namun demikian, dalam sebuah ulasan majalah *the Economist* edisi 28 Juli 2014 pernah dituliskan judul "Width, not depth-poverty measures". Secara sederhana, judul ini ingin menyampaikan bahwa realitas ukuran kemiskinan hari ini "melebar" dalam tinjauannya untuk melakukan perbandingan kemiskinan antar wilayah, negara dan inter-regional, tetapi tidak mendalam dalam memahami permasalahan kemiskinan di lapangan yang tidak hanya semata masalah ekonomi. Klasifikasi kemiskinan atau kesejahteraan semata-mata diukur dari pendapatan atau pengeluaran dalam ukuran materi seperti pendapatan, konsumsi atau kepemilikan asset. Dampaknya, permasalahan kemiskinan menjadi sebuah permasalahan yang nampaknya tertangani

¹Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (email korespondensi: aantiquo@gmail.com)

²Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada (email: nurhadi@ugm.ac.id)

secara progresif dalam statistik pembangunan tetapi sebenarnya realitas kemiskinan lebih kompleks pada level keseharian masyarakat.

Wacana kritis terhadap ukuran kemiskinan moneter ini didukung oleh realitas bahwa kemiskinan yang semakin kompleks diindikasikan dengan tingkat ketimpangan pendapatan baik di dalam negara maupun antar negara yang meningkat (Ravallion, 2003). Salah satu bukti empiris ialah hasil simulasi terhadap data kemiskinan global 65 negara selama 1995-2005; tren penurunan kemiskinan secara selama beberapa dekade terakhir tampak nyata karena pendekatan metode dan teknik statistik yang diterapkan (Dhongde & Minoiu, 2010). Data empiris lain juga menunjukkan hasil perhitungan Global Multidimension Poverty Index (MPI) atau Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) menunjukkan terdapat 30 persen (1,6 milyar) penduduk dunia tergolong miskin secara multidimensi, jauh lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan moneter global sebesar 10,7 persen. Begitu juga di Indonesia, pada tahun 2014, MPI menunjukkan pada level 29,7 persen, di saat kemiskinan moneter hanya 11,13 persen (Alkire, 2016).

Oleh karena itu, penetapan definisi dan ukuran kemiskinan dalam mengukur tingkat kemiskinan sangat fundamental sehingga mempunyai konsekuensi terhadap siapa yang dianggap miskin atau tidak dan secara kumulatif menentukan terhadap tingkat kemiskinan. Seperti yang dikemukakan oleh Laderchi et al., 2003 (dalam Kwadzo, 2015) bahwa berbagai konseptualisasi dan ukuran kemiskinan akan tidak menunjukkan orang yang sama sebagai orang miskin atau dengan kata lain mungkin akan menghasilkan estimasi yang berbeda apakah suatu populasi itu miskin atau tidak. Secara garis besar, studi dan standar ukuran kemiskinan yang digunakan ialah kemiskinan moneter, seragam dan dirumuskan oleh para ilmuwan secara *top down* (deduktif) sehingga cenderung melakukan over-simplifikasi yang mengarahkan kepada kesimpulan yang salah tentang dimensi kemiskinan.

Kemiskinan itu bersifat multi dimensional dan dihadapi oleh semua wilayah dan komunitas masyarakat maka kemiskinan antar wilayah dan komunitas bahkan antar negara tentu akan mempunyai karakteristik yang unik dan spesifik terhadap kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam perspektif pembangunan untuk

menciptakan kesejahteraan, realitas politik, ekonomi, sosial dan budaya hingga historis yang melekat dalam berbagai masyarakat di Indonesia perlu dipertimbangkan demi keberhasilan pembangunan. Apalagi terdapat fakta adanya disparitas pembangunan antar wilayah administrasi dan antar perkotaan-perdesaan maupun topografi alam hingga keragaman budaya masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, mengukur kemiskinan secara seragam dengan dimensi tunggal akan menjadi bias dan mengarahkan kepada kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Dengan demikian, pengukuran kemiskinan perlu mempertimbangkan faktor selain ekonomi semata. Salah satu upaya yang perlu ialah mengarahkan kepada pengukuran kemiskinan yang berbasis budaya, sebagaimana budaya menjadi faktor pembeda yang unik pada setiap negara atau kelompok masyarakat. Small et al. (2010) menyatakan "Culture agenda is back on poverty research", sebagai ungkapan atas perkembangan dua dekade terakhir atas upaya dari para ahli kemiskinan sosiologi, peneliti kependudukan bahkan ahli ekonomi global untuk mulai mengajukan pertanyaan tentang peran budaya dalam berbagai aspek tentang kemiskinan. Sementara, Amartya Sen (1982) dalam Raza et.al. (2016) memberikan sudut pandang dalam kontekstualitas kemiskinan bahwa penilaian dan pengukuran kemiskinan yang mengakomodasi peran dari nilai moral dan menganggap keberadaan sebuah komunitas merupakan hal yang sangat penting. Pendekatan budaya ini muncul atas realitas strategi penanggulangan kemiskinan di berbagai negara di bawah koordinasi Bank Dunia, IMF dan UNDP belum cukup mampu mengembangkan kebutuhan sosial ekonomi yang dikaitkan dengan berbagai perbedaan budaya dan psikologis dari penduduk lokal (Mitra, 1992; McDowell, 1996, dalam Raza et.al 2016). Lebih jauh lagi, secara eksplisit, mereka mencoba untuk menjelaskan perilaku dari masyarakat berpendapatan rendah dalam perspektif faktor-faktor budaya.

Munculnya kembali arus penelitian budaya kemiskinan ini mengangkat kembali hasil penelitian kemiskinan kultural yang sudah jauh dilakukan sebelumnya oleh Oscar Lewis (1959). Lewis meneliti bagaimana strategi bertahan hidup pada lima keluarga miskin di kota Meksiko yang menyimpulkan kemiskinan muncul karena adanya sejumlah keyakinan dan nilai utama

seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tingkat pendidikan rendah, inferior serta tidak mempunyai daya juang dan kemampuan untuk memikirkan masa depan yang diturunkan turun temurun dalam hubungan keluarga (Lewis, 1959). Konteks kemiskinan budaya tidak lepas dari sesuatu yang melekat dan partisipasi dari orang miskin itu sendiri. Hal ini disadari dalam kebijakan Bank Dunia menjelang tahun 1990 dengan mengembangkannya pemahaman yang lebih lengkap tentang analisis kemiskinan dengan mencakup inklusi sosial dan perspektif orang miskin (Narayan et.al., 2000 dalam Agyarko, 2002). Pertimbangan budaya melalui pendekatan partisipatoris dalam pemahaman dan pengukuran kemiskinan ini menjadi sangat penting dikaitkan dengan implikasinya terhadap pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan.

Untuk itu, dalam diskursus tentang pengukuran kemiskinan dan dipertimbangkannya kembali faktor budaya dan partisipatoris dalam kajian kemiskinan menjadi penting untuk meneliti fenomena kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di saat pembangunan kesejahteraan dalam berbagai indikator bidang pendidikan dan kesehatan serta aspek pembangunan lainnya seperti ketahanan pangan, demokrasi, tata kelola pemerintahan, pengendalian laju inflasi dan sebagainya dinilai berhasil diantara provinsi di Pulau Jawa dan Nasional, pembangunan DIY menyisakan permasalahan tingkat kemiskinan yang tinggi, diantara provinsi lain secara nasional khususnya di Pulau Jawa.

Namun demikian, jika dilihat melalui indeks kemiskinan multidimensi (IKM). Secara umum, bahwa kemiskinan yang diukur secara multidimensi menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi secara nasional maupun antar provinsi dibandingkan tingkat kemiskinan secara moneter. Dalam kasus perbandingan tingkat kemiskinan multidimensi antar provinsi di Pulau Jawa mempunyai komposisi atau pola yang bergeser. Ketika perbandingan tingkat kemiskinan secara moneter sebelumnya, Provinsi DIY berada pada posisi paling tinggi, sedangkan dalam perbandingan tingkat kemiskinan multidimensi Provinsi DIY menjadi provinsi dengan IKM terendah kedua setelah DKI Jakarta, yaitu berturut-turut sebesar 15,8 persen dan 12,8 persen, sementara provinsi lain di Pulau Jawa di atas angka 20 persen.

Melalui perbandingan ini, dapat diketahui bahwa karakteristik kemiskinan yang diukur melalui kemiskinan multidimensi menunjukkan kondisi kemiskinan Provinsi DIY yang lebih baik atau dengan kata lain kondisi sosial (pendidikan, kesehatan dan standar hidup) yang lebih baik.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2014, tingkat kemiskinan DIY sebesar 14,55 persen, ini berarti merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, sebagaimana beberapa tahun sebelumnya. Baru pada tahun 2015, tingkat kemiskinan DIY sebesar 13,16 persen, sedikit di bawah Jawa Tengah sebesar 13,32 persen. Tingkat kemiskinan DIY juga secara ajeg lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan secara nasional, ditunjukkan pada tahun 2015, tingkat kemiskinan nasional sebesar 11,13 persen. Tidak hanya tingkat kemiskinannya tinggi, permasalahan kemiskinan di DIY semakin kompleks dengan adanya ketimpangan pendapatan yang lebar yaitu berdasarkan rasio gini pada tahun 2014 sebesar 0,42, sekaligus tertinggi kedua se Pulau Jawa dan di atas nilai rasio gini nasional. Tidak hanya itu, disparitas penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan disparitas antar penduduk miskin juga paling lebar. Hal ini ditunjukkan oleh indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) DIY pada tahun 2014 sebesar 2,35 sebesar 0,61 merupakan tertinggi se Pulau Jawa.

Hal ini sejalan dengan capaian pembangunan DIY menunjukkan keberhasilan pada sektor dasar secara nasional. Salah satu indikatornya dapat ditinjau dari level Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan ukuran keberhasilan *outcome* pembangunan dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015), IPM (metode baru) DIY pada tahun 2014 sebesar 76,81 merupakan tertinggi kedua secara nasional dan Pulau Jawa, setelah DKI Jakarta, sekaligus lebih tinggi dari level IPM secara nasional. Selain IPM, indikator makro berupa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY yang paling rendah se Pulau Jawa sebesar 3,24 persen pada tahun 2015. Tren TPT DIY berada pada level yang lebih rendah baik jika dibandingkan dengan TPT provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa maupun TPT Indonesia (nasional). Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diuraikan di atas, maka studi ini memusatkan perhatian kepada masalah yang

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana rumah tangga miskin memaknai kesejahteraan dan kemiskinan mereka?

Kerangka Teori

Dalam kajian kebudayaan, pola-pola keyakinan, sikap dan perilaku kemiskinan telah dilakukan dan dikemukakan pertama kali istilah kemiskinan kultural (*culture of poverty*) oleh Oscar Lewis (1959). Ia mengumpulkan 70 kebiasaan dan norma terhadap lima keluarga miskin di Meksiko (Carmon, 1985; Coward, et al., 1974) sebagai representasi budaya kemiskinan yang dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu (a) Perilaku, nilai utama dan karakter dari individu (*individual*), (b) Kondisi Keluarga (*Familial*), (c) Kondisi Komunitas Miskin (*Communal*), dan (d) Hubungan antara kebudayaan setempat dan masyarakat yang lebih luas (*Societal*). Lewis (1965, dalam Small et al, 2010) menyimpulkan bahwa:

“budaya kemiskinan ialah seperangkat kebudayaan berupa perilaku, keyakinan, nilai dan praktik sehari-hari sebagai respons atas kondisi kemiskinan yang dihadapi dan akan cenderung melanggengkan kemiskinan itu sendiri sepanjang waktu, meskipun pada saat kondisi struktural memberikan kesempatan untuk bangkit dari kemiskinan.”

Dalam konsep yang lebih netral, tidak cenderung menyalahkan budaya orang miskin sebagai penyebab kemiskinan sebagaimana Lewis (1966), Davidson (1985) menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan budaya bahwa dengan mengasumsikan bahwa perilaku dari orang miskin merupakan penyebab terbesar dari kondisi mereka maka salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan ialah mendorong potensi dan perilaku yang produktif dan mengubah perilaku yang kontraproduktif dari budaya masyarakat miskin.

Begitu juga dengan Harvey & Reed (1992) menyatakan dalam melihat kultural sebagai teori atribut dalam kemiskinan, maka perlu dipastikan dengan mengajukan pertanyaan, apakah ada atau tidaknya konten kultural dalam kemiskinan. Jika ada, maka pertanyaan kedua, apakah kontennya bersifat negatif atau positif. Melihat sisi positif ini penting, mengingat teori kemiskinan kultural Lewis

yang cenderung melihat kemiskinan sebagai kultur mal-adaptif dan patologis sehingga menyebabkan kemiskinan itu sendiri (1965, dalam Small et al., 2010).

Dalam upaya untuk memahami kemiskinan kultural yang melekat pada masyarakat miskin maka pendekatan yang paling tepat ditempuh ialah partisipatoris. Melalui pendekatan ini, sisi keterlibatan orang miskin menjadi faktor penting dalam memahami tentang kemiskinan mereka. Pendekatan partisipatori telah diperkenalkan oleh Bank Dunia sejak tahun 1992. Salah satu proyeknya ialah *Consultation with the Poor* (Mukherjee, 1999) atau *Voice of the Poor* (Narayan, et al., 2000) yang mengkaji perspektif kemiskinan dari 60.000 masyarakat miskin di 60 negara. Dalam Chamber (2012) dan Narayan (2000) terdapat empat topik yang diselidiki dalam penelitian itu, yaitu (a) Pandangan dan konsep masyarakat miskin mengenai kehidupan yang baik atau kesejahteraan (*wellbeing*) and kehidupan yang tidak baik atau kemiskinan (*illbeing*), (b) Prioritas masyarakat miskin, (c) Pengalaman dan perilaku masyarakat miskin terhadap institusi, (d) Hubungan jender dan rumah tangga dalam kaitan pengalaman kemiskinan.

Ringkasan laporan dari penelitian ini dalam *World Development Report 2000/2001* sebagai berikut: Orang-orang miskin menjelaskan berulang kali secara rinci dan menyedihkan tentang apa yang hanya telah mereka melihat sekilas sebelumnya, yaitu pengalaman psikologis dan dampak kemiskinan. Tren ini terjadi secara serius karena sebagian besar orang miskin yang terlibat dalam proyek di berbagai wilayah mengatakan bahwa mereka menghadapi kondisi yang lebih buruk sekarang, memiliki peluang ekonomi yang lebih sedikit dan hidup dengan ketidak-amanan yang lebih besar daripada di masa lalu, meskipun mereka menyatakan ini dengan alasan rinci yang bervariasi antar wilayah.

Masyarakat miskin juga merasakan kesan yang negatif terhadap keberadaan lembaga-lembaga pemerintah bahkan ketika program pemerintah yang dinilai penting bagi mereka. Akibat realitas atas kebijakan yang tidak humanis, korupsi dan layanan publik yang berkualitas buruk tampaknya menjadi norma, baik dalam perawatan kesehatan atau dalam program dukungan sosial. Sementara itu, orang miskin menemukan jaringan lokal

dan lembaga mereka sendiri menjadi sesuatu yang paling diandalkan. Selain itu, hubungan gender berada dalam masa transisi bermasalah, dengan kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan.

Selain daripada itu, pandangan berbagai masyarakat miskin antar negara ketika ditanya tentang hidup yang baik/bahagia (*good life/wellbeing*) dan hidup yang buruk/ tidak bahagia (*bad life/illbeing*) sangat bervariasi. Hidup yang baik diekspresikan sebagai kebahagiaan, harmoni, kedamaian, bebas dari kecemasan, dan pikiran yang damai. Misal salah satunya yang cukup lengkap dari seorang Perempuan Lansia Miskin di Etiopia.

"Hidup yang lebih baik bagi saya ialah menjadi sehat, penuh kedamaian dan hidup dalam cinta dan kasih sayang tanpa merasakan kelaparan. Cinta dan kasih sayang lebih dari apapun. Uang tidak bernilai ketika tidak ada cinta dan kasih sayang."

Sementara, kehidupan yang buruk dideskripsikan dalam istilah kekurangan materi, pengalaman buruk, perasaan bersalah/tidak baik terhadap diri sendiri (malu, depresi, kecemasan, takut, sedih) dan penderitaan. Selain beranekaragam antar negara, terdapat perbedaan cukup nyata antar wilayah kota-desa, usia (lansia-dewasa-anak) dan jenis kelamin. Namun, secara garis besar, masyarakat miskin menjelaskan *wellbeing* dan *illbeing* dalam lima kelompok yaitu (a) Kekayaan Materi (*Material Wellbeing*), (b) Kesehatan (*Physical Wellbeing*), (c) Keamanan (*Security*), (d) Kebebasan Memilih dan Bertindak (*Freedom of Choice and Action*), dan (e) Hubungan sosial yang baik (*Social Wellbeing*).

Dalam konteks partisipatoris, definisi kemiskinan akan dikonseptualisasikan oleh masyarakat miskin itu berdasarkan perspektif mereka. Istilah pengukuran kemiskinan partisipatoris (*Participatory Poverty Assessment*) pertama kali dikemukakan dan digunakan oleh Bank Dunia pada tahun 1992. Awalnya, pendekatan ini dirancah sebagai riset berbasis lapangan untuk melengkapi pengukuran konservatif yang berpusat pada analisis kuantitatif menggunakan garis kemiskinan (Norton, et al. 2001). Mendengarkan suara dari rumah tangga miskin mampu menyediakan

pemahaman yang lebih dalam terhadap kemiskinan yang bersifat multi-dimensi.

Menurut Norton (2001), "pengukuran kemiskinan partisipatoris ialah sebuah instrumen yang menjadikan pandangan orang miskin dalam analisis kemiskinan dan formulasi strategi dalam penyusunan kebijakan publik". Sementara menurut Narayan et al. (2000), pengukuran kemiskinan partisipatoris ialah "Sebuah proses penelitian interaktif untuk memahami kemiskinan dari berbagai perspektif para pemangku kebijakan yang terlibat hingga dan merencanakan rencana tindak lanjut. Pihak terpenting yang dilibatkan pada proses penelitian ini ialah kelompok orang miskin laki-laki dan perempuan".

Metode

Studi ini menggunakan metode kualitatif induktif (eksploratori) melalui pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan menemukan makna dan definisi kemiskinan secara subyektif (*subjective meaning*) berdasarkan kesadaran dan perilaku kehidupan sehari-hari responden yang menggambarkan kemiskinan kultural. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan data persentase rumah tangga. Sasaran (RTS) pada desil 1 dan desil 2 tertinggi di Gunungkidul, hasil dari Pendataan Basis Data Terpadu 2015 (BPS dan TNP2K Gunungkidul). Lokasi penelitian terpilih yaitu Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari. Adapun unit analisis penelitian ini ialah anggota keluarga pada rumah tangga miskin dengan *theoretical sampling* berdasarkan dua karakteristik berupa jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dan kelompok usia (anak-anak, dewasa dan lanjut usia). Teknik pengumpulan data mengadopsi *Participatory Poverty Assessment* melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam dan FGD disertai dokumentasi. Uji keabsahan data untuk memperoleh data yang valid ditempuh dengan menggunakan triangulasi isi atau konten dan triangulasi sumber. Selanjutnya dilakukan teknik analisis deskriptif.

Hasil dan Diskusi

Makna Kehidupan yang Baik (Well-being)

Dalam keragaman berbagai faktor internal dan eksternal, makna kehidupan yang baik (*well being*) menjadi subyektif bagi setiap masyarakat. Ketika masyarakat miskin

di lokasi penelitian ditanya mengenai makna kehidupan yang baik, secara umum mereka mengkonsepsikan makna kehidupan yang baik menjadi beberapa makna dan secara gradual, bukan tunggal. Tiga kondisi kehidupan yang baik yang utama menurut masyarakat miskin yaitu pertama, memiliki kondisi fisik yang sehat; kedua, mendapatkan suasana guyub rukun (hubungan relasional yang harmonis) dengan seluruh warga masyarakat; dan ketiga, memiliki kecukupan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar utamanya kebutuhan pangan.

Pilihan utama konsep kesejahteraan masyarakat miskin yaitu memiliki kondisi fisik yang sehat sangat terkait dengan kebutuhan atau prasyarat mata pencaharian masyarakat yang sangat bergantung pada kekuatan fisik. Dapat dikatakan sebagian besar aktivitas pekerjaan yang dijalani sebagian besar masyarakat dari bertani, mencari pakan untuk ternak (ngarit) atau menggembala ternak hingga menjual hasil pertanian atau kayu bakar ke pasar terdekat menuntut fisik yang sehat dan bugar. Para petani miskin berjalan kaki membawa barang hasil penjualan dengan menempuh jarak kurang lebih 5 km dari wilayah permukiman ke Pasar Sidoharjo yang terletak di Bayat, Klaten atau Pasar Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul. Jalan yang ditempuh pun bukan jalan yang kondisi rata melainkan naik turun dan berkelok. Setidaknya setiap keluarga, biasanya para wanita/ibu rumah tangga atau suami istri menjual hasil pertanian sayur-sayuran, buah-buahan dan atau kayu bakar ke pasar 2-4 kali dalam sepekan tergantung hasil pertanian yang terkumpul. Dalam satu kali perjalanan pergi pulang, membutuhkan waktu 4-5 jam perjalanan disertai istirahat sejenak. Meskipun sudah berhasil mengumpulkan hasil pertanian yang siap dijual, terkadang mereka tidak bisa menjual jika kondisi fisik mereka tidak sehat.

"Ya tidak setiap hari mas ke pergi ke pasar. Kalau ke pasar itu biasanya jika punya gawan (hasil pertanian yang siap di jual ke pasar), jika tidak ada ya tidak ke pasar. Lalu kadang jika capek dan sakit nyeri pinggang atau ketika meriang juga tidak sanggup pergi ke pasar meski ada gawan". (Mukinah, Wawancara 9 September 2017).

Tak terkecuali, segala aktivitas keseharian di rumah tangga juga yang masih dikerjakan

dengan tenaga manusia. Misal mengambil air di sumur, mencari kayu bakar, mencuci pakaian, memperbaiki rumah atau kandang. Jika mereka sakit, mereka tidak dapat mengupayakan berbagai aktivitas harian untuk menunjang kehidupan mereka. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya transportasi dan operasional lainnya untuk berobat jalan apalagi rawat inap tidak selalu ada, meskipun sudah ada jaminan sosial kesehatan.

Makna kesejahteraan bagi masyarakat miskin kedua, ialah kehidupan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat. Dalam kondisi kehidupan yang secara material relatif mengalami keterbatasan, masyarakat miskin masih merasa mendapatkan kebahagiaan ketika mereka menikmati srawung (bergaul) dalam tatanan sosial yang harmonis. Sebagai contoh, cukup banyak dari mereka sudah pernah merantau untuk bekerja ke luar kota, luar provinsi bahkan luar Pulau Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera. Namun, karena hanya berbekal pendidikan rendah dan keterampilan terbatas, mereka hanya bisa menjadi tenaga kerja kasar di perusahaan atau perkebunan, selain usaha mandiri di sektor informal.

Seperti cerita Marsinah bahwa ia telah merantau bersama suaminya di Jakarta selama kurang lebih 10 tahun. Setelah menekuni berbagai pekerjaan dan usaha, ia dan suaminya merasa selalu "pusing" ketika harus mengatur pengeluaran kebutuhan sehari-hari, apalagi saat waktunya harus membayar sewa rumah, padahal penghasilan yang didapatkan relatif lebih besar jika dibandingkan di desa. Di sisi lain, dia juga harus beradaptasi dengan kehidupan Kota Jakarta yang keras. Dia merasakan adanya persaingan antar masyarakat hingga pernah merasakan gangguan pada usahanya yang mulai ramai dari sesama pendatang yang lain. Kondisi tersebut menjadikan kondisi jiwa yang tidak nyaman dan betah untuk bertahan hidup di perantauan. Akhirnya dia memilih untuk kembali ke kampung halaman sendiri, tinggal di rumah sendiri meskipun mempunyai penghasilan yang relatif lebih kecil.

Lalu bentuk harmoni seperti apa yang masyarakat miskin anggap sebagai salah satu makna kesejahteraan? Kebahagiaan bagi mereka ialah hidup bersama yang diistilahkan oleh masyarakat sebagai guyub rukun. Di-antara warga masyarakat saling mengenal sehingga mereka bisa saling bertegur sapa, bersosialisasi dalam

berbagai acara per-kumpulan warga dengan intensitas yang cukup sering. Diantara masyarakat juga masih tinggal dengan keluarga besarnya baik dalam satu rumah, satu dusun atau di seberang desa atau dusun. Mereka saling mengenal dengan warga masyarakat dalam satu dusun bahkan sebagian satu desa. Kedekatan diantara mereka dibuktikan ketika terdapat berbagai acara hajatan, informasi atau undangan acara dapat tersebar ke tetangga terdekat, tetangga dusun hingga beda desa hanya dengan melalui undangan lisan atau mulut ke mulut sesama warga masyarakat. Begitupun bagi keluarga yang diundang akan berupaya menghadiri baik sendiri maupun dengan beramai-ramai misal menyewa kendaraan pick up terbuka. Tak terkecuali memberikan bantuan bentuk uang (menyumbang) hingga tenaga dan bahan makanan.

Selain dalam acara hajatan, mereka sudah terbiasa ada saling membantu ketika ada yang tertimpa musibah atau membutuhkan uang atau ketika saling berbagi ketika hasil panen sayur-mayur cukup banyak untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam interaksi sosial, masyarakat umumnya saling menghormati dan menaati norma sosial yang menjunjung tinggi kerukunan bersama sehingga hampir tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam usaha apalagi pertikaian antar warga. Contohnya, dalam hal pembagian beras miskin (raskin) juga dibagikan secara merata. Akhirnya, jumlah raskin yang diterima setiap keluarga berbeda-beda antar dusun, ada yang 10 kg dan 11 kg.

Ketiga, makna kesejahteraan yang dikaitkan langsung secara ekonomi yaitu mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama makan. Menurut Sukiyo makna kesejahteraan atau kondisi yang membuat perasaan bahagia ialah "Sehat, ada uang sehari-hari cukup dan perut kenyang". Tidak jauh berbeda pendapat, Sudiro saat wawancara menyampaikan bahwa makna kesejahteraan yaitu, "Yang terpikirkan ialah bagaimana hari ini bisa makan dan besok bisa makan". Tidak jauh berbeda, bagi Daryanto, sesuatu yang membuatnya merasa senang atau sejahtera ialah saat musim panen tiba sehingga ia mempunyai cadangan pangan untuk istri dan anaknya. Sementara menurut istrinya, ia merasa yang penting adalah ketika ada gawan (barang bawaan untuk dijual) sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga.

Hal ini mengingat, meskipun mata pencaharian mereka ialah petani yang

menghasilkan bahan pangan berupa padi, sayuran, buah dan ternak unggas/besar, hasil pertanian yang mereka dapatkan tidak menentu sehingga masih belum selalu mencukupi kebutuhan makan mereka selama setahun. Dalam setahun, para petani di Desa Mertelu hanya mampu panen dua kali, menunggu musim hujan dan tidak bisa menanam pada musim kemarau. Bagi petani miskin yang menggarap lahan sawah sempit atau hanya bagi hasil, hasil panen mereka rata-rata tidak mencapai 4-8 sak (satuan setempat) gabah, jika digiling hanya menghasilkan 100-200 kg beras. Beras sebanyak ini hanya cukup untuk bertahan paling lama 3-5 bulan sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Sehingga dalam setahun, hasil beras dua kali panen hanya cukup untuk 10 bulan. Belum lagi, kebutuhan lain seperti uang saku bagi yang mempunyai anak sekolah, kebutuhan operasional seperti listrik, BBM, pulsa, pakaian, termasuk biaya untuk memberikan sumbangan sosial dalam berbagai hajatan kadang ditutupi dengan cara menjual hasil panen.

Lebih lanjut, bagi masyarakat miskin, makna kecukupan pangan ini lebih dipentingkan pada sisi kontinuitas dan kuantitas, bukan kualitas. Kontinuitas dan kuantitas ini dimaknai mampu terjamin makan tiga kali pada hari ini, besok, lusa hingga seterusnya juga dapat makan tiga kali. Sangat jelas, bagaimana mereka yang berpenghasilan kecil dan tidak tetap, pola pemenuhan atau belanja bahan makanan selain beras mengandalkan hasil penjualan produk pertanian ke pasar atau upah buruh harian lepas. Frekuensi makan sehari tiga kali itupun, jika ditinjau dari kuantitas makan saja. Sementara mengenai kualitas, yaitu dari kelengkapan menu, variasi menu apalagi kecukupan gizi belum menjadi pertimbangan utama mereka. Kebanyakan mereka masih menemui hanya makan dengan nasi dan sayur saja, kadang ditambah lauk seadanya seperti tempe/tahu/krupuk atau sambal atau jenis makanan yang relatif terjangkau dengan uang belanja dan diperkirakan cukup untuk persediaan menu tambahan selain ini selama 2-3 hari.

Sementara itu, bagi masyarakat miskin kepemilikan aset (seperti lemari pendingin, televisi, kendaraan bermotor, tabung gas, lahan dan ternak) dan standar fasilitas perumahan bukan sesuatu yang sangat prioritas sebagai simbol kesejahteraan atau kelayakan hidup. Di rumah informan yang dikunjungi, umumnya

hanya ada meja kursi besar untuk tamu sekaligus untuk makan, amben (semacam ranjang dari bambu/kayu tanpa ada kasur), lemari pakaian. Standar kepemilikan aset-aset tersebut lebih kepada fungsional untuk mendukung keseharian mereka.

Sebagaimana data TKPK Gunung Kidul 2016 menunjukkan lebih dari separuh atau sebesar 55 persen individu miskin di desar Mertelu masih menggunakan jenis kloset cemplung cubluk. Masyarakat miskin mengetahui dari sisi kesehatan pentingnya menggunakan jenis kloset leher angsa yang sehat. Namun, mereka menganggap menggunakan fasilitas ini belum sebagai prioritas sehingga berupaya mengadakan fasilitas ini secara mandiri dan lebih berharap mendapatkan bantuan untuk menggantinya. Terdapat kebutuhan lain yang lebih mendesak seperti membeli kendaraan bermotor, televisi bahkan mengadakan hajatan atau me-nyumbang atau biaya anak sekolah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa upaya pada umumnya petani termasuk yang miskin di pedesaan lebih karena motif untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, belum pada tingkat untuk mengumpulkan keuntungan untuk mengkapitalisasi aset. Terbukti, jarang petani yang luas lahan pertaniannya bertambah luas, sebaliknya malah berkurang karena dibagi menjadi warisan bagi keturunannya atau dijual untuk memenuhi kebutuhan mendesak.

Dengan demikian, makna kesejahteraan kemiskinan yang dipahami masyarakat ini dapat dikatakan sebagai bagian kultural masyarakat dan bersifat lokal. Mungkin saja berbeda bagi kelompok masyarakat di kultur perkotaan, pesisir atau kultur pertanian tetapi di lain wilayah. Begitu juga, makna kesejahteraan ini jelas menjelaskan adanya perbedaan sudut pandang makna kesejahteraan yang dikonsepsikan oleh struktur sosial (pemerintah). Konsep kesejahteraan yang di-ukur oleh pemerintah secara makro ialah memiliki konsumsi makanan dari kecukupan kalori dan non makanan yang dikonversi menjadi garis kemiskinan dan secara mikro ialah kriteria kepemilikan aset dan perumahan.

Pandangan terhadap Kemiskinan

Dalam hal pandangan masyarakat miskin terhadap kemiskinan, secara sederhana pada umumnya mereka mengasosiasikan kemiskinan kepada ukuran *gadhah* (kaya) atau *cekap*

(cukup) dan *mboten gadhah* (miskin) atau *kirang* (kekurangan). Pandangan dari *gadhah* ialah paling banyak disebutkan dari tiga ukuran yaitu mempunyai lahan pertanian, jumlah ternak sendiri, dan bangunan rumah dari sisi konstruksinya.

“Tiyang gadhah (orang kaya) itu di sini biasanya punya sapi lebih dari dua ekor, punya tanah sendiri dan rumahnya sudah tembok, lantai bukan tanah, pokoknya ya lebih bagus dari kebanyakan warga di sini”.
(Warni, FGD pada 23 September 2017)

Ketiga kriteria kesejahteraan ini dapat dikaitkan sebagai sesuatu yang sangat dekat dengan kebudayaan masyarakat petani. Ternak dan lahan sawah/tegalan merupakan aset utama sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan pertanian di daerah ini. Informasi dari hasil PBDT menunjukkan sebagian besar masyarakat miskin. Sebanyak 875 RTS atau 97 persen dari RTS hanya memiliki lahan di bawah 0,5 hektar. Paling banyak yaitu 102 RTS dengan kepemilikan lahan seluas 1500 m². Dalam budaya Jawa yang masih memegang budaya warisan, kepemilikan lahan untuk tinggal dan usaha pertanian yang dimiliki semakin kecil karena dibagikan kepada anak-anaknya secara turun temurun. Selain karena pembagian warisan, lahan sawah petani riskan dijual karena kebutuhan besar dan mendesak yang memaksa lahan sawah dijual. Seperti cerita Pak Sudiro, ia awalnya mempunyai lahan pertanian luas, tetapi karena ia menderita sakit asma akut, begitu juga istrinya juga menderita sakit maag parah, gondong dan gangguan syaraf, maka lahan sawah itu sedikit demi sedikit ia jual sehingga ia sekarang tidak mempunyai lahan sawah.

Selain tanah, ternak merupakan aset yang dijadikan sebagai tabungan ketika membutuhkan dana dalam jumlah besar dan kadang mendesak. Namun, ternak dipelihara tidak selalu yang dimiliki sendiri, melainkan ternak yang hanya dikelola oleh petani dengan sistem *nggadhuh*. Sebagian kepemilikan ternak juga dalam status dimiliki sebagai usaha dengan cara meminjam kredit dari lembaga keuangan. Jika pada akhir masa pemeliharaan ternak sekitar 1-1,5 tahun, ternyata tidak berhasil beranak, maka ternak tersebut akan langsung dijual untuk menutup pinjaman. Dengan

demikian, kepemilikan aset ternak meskipun sangat signifikan bagi petani dalam upaya mendapatkan tambahan penghasilan tetapi tidak semua keluarga mampu memiliki apalagi dalam jumlah yang cukup banyak. Data sekunder dari TKPK Gunung Kidul mendukung pernyataan informan di lapangan yaitu 46,7 persen diantara masyarakat miskin di Mertelu tidak mempunyai ternak sapi sama sekali, dan 49,2 persen mempunyai 1-2 ekor sapi.

Selanjutnya, ukuran kemiskinan yang ketiga yaitu bangunan rumah yang ditinggali. Untuk kepemilikan tanah dan bangunan rumah, bukan menjadi faktor ukuran kekayaan. Karena tidak sebagaimana di kota yang masih berstatus sewa, seluruh keluarga baik yang *gadhah* maupun yang *mboten gadhah*, status kepemilikan tanah dan rumahnya telah milik sendiri. Data TKPK mendukung hal ini, 100 persen keluarga RTS di Desa Mertelu mempunyai status kepemilikan sendiri baik atas tanah maupun bangunan rumah. Karena itu, ukuran yang dilihat ialah keluarga yang *gadhah* mempunyai konstruksi yang lebih bagus dibanding kebanyakan rumah keluarga *mboten gadhah* pada umumnya.

“Tiyang gadhah (orang kaya) itu mempunyai rumah bagus, sudah tembok yang di plester. Lantai sudah keramik. Kalo rumah saya sudah tembok dari batako tetapi belum di plester dan yang di plester malah lantainya. Itu juga dari bantuan pemerintah. Trus sudah mempunyai kamar mandi sendiri, ada WC nya. Keluarga kami masih menggunakan kamar mandi umum. Rumah orang kaya juga gentengnya biasanya sudah genteng press (cetak)”. (Rahmi, wawancara September 2017).

Dalam pengamatan peneliti, dari semua keluarga informan yang dikunjungi memang hanya memiliki bangunan rumah yang berbeda dengan ukuran yang dianggap sebagai *tiyang gadhah*. Semua keluarga miskin yang dijadikan informan, mempunyai dinding sebagian anyaman bambu dan batako, lalu sebagian sudah sebagian besar sudah tembok batako tetapi belum di plester. Lantainya baru di plester semen pada bagian ruang tamu, sementara ruang lainnya masih tanah, bahkan ada yang masih lantainya semua tanah. Begitu juga dengan kamar mandi, selain masih di tempat umum seperti keluarga Rohmah, ada yang sudah mempunyai tetapi jenis klosetnya cemplung

seperti rumah Sudiro, ada yang sudah leher angsa tetapi menurut informasi mereka, seperti *plester* lantai, adanya kloset leher angsa belum lama mereka miliki setelah mendapat bantuan dari pemerintah. Secara keseluruhan dapat didukung oleh data TKPK, setidaknya 63,8 persen keluarga masih mempunyai lantai tanah berupa plester semen/batubata dan 26,3 persen keluarga, masih memiliki lantai rumah berupa tanah.

Namun demikian, para informan menyatakan adanya status *gadhah* (kaya) dan *mboten gadhah* (miskin) itu bukan sebagai sebuah istilah yang muncul dalam interaksi sosial mereka. Mengapa demikian? Karena istilah “miskin” menjadi label yang kemudian diasosiasikan dengan pembicaraan tentang alokasi bantuan seperti BLT, PKH atau bantuan lainnya. Karena itu, perbedaan dan ketimpangan pada masyarakat karena ukuran kemiskinan di atas tidak menciptakan perbedaan dan ketimpangan yang mencolok di masyarakat. Prinsip kesamaan, kesetaraan dan kebersamaan dalam sosialisasi dan partisipasi di komunitas masyarakat masih mampu menutupi perbedaan kemampuan ekonomi di masyarakat.

“Sami mawon (sama saja) Mas, sehari-hari ya tidak ada perlakuan atau pergaulan yang berbeda antara tiyang gadhah (kaya) dan mboten gadhah (miskin)” (Warti, FGD pada tanggal 23 September 2017).

Pandangan keluarga miskin atas kemiskinan yang melekat pada kehidupan sehari-hari terlihat seakan-akan memunculkan dualitas persepsi kemiskinan. Pada satu sisi, peneliti menemukan pandangan dan penerimaan masyarakat miskin atas realitas kemiskinan ini. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan bahwa mereka telah berupaya keras dan merasa cukup dengan hasil yang mereka terima saat ini.

“Hidup kami biasa-biasa aja.. Mau gimana ya, mau dibuat susah ya tiap hari masih bisa hidup. Srawung (bersosialisasi) dengan tetangga bisa. Tapi mau dibilang bahagia tapi keadaannya ya seperti ini.” (Daryanto, pada 9 September 2017)

Tak dapat dipungkiri bahwa beban keluarga Daryanto terkait dengan jumlah anggota keluarganya yang banyak. Bagi keluarga Daryanto, termasuk pengakuan istrinya,

meskipun anak banyak jelas membutuhkan banyak biaya. Tapi bagi mereka bahwa mendapatkan karunia anak adalah rejeki dari Gusti Allah; tidak boleh kita menolaknya ataupun mencegahnya dengan mengikuti program Keluarga Berencana (KB), meskipun secara ekonomi kondisi masih kekurangan. "Dulu pernah sekali ikut KB, tetapi tidak cocok, terus tidak pernah memakai sama sekali sehingga lahir anak sampai anak kedelapan", imbuh dari istri Daryanto. Hal ini sejalan ketika ditanyakan pendapat terhadap ungkapan "Banyak anak, banyak rejeki", Daryanto menjelaskan bahwa hal tersebut benar adanya karena jelas keluarganya telah lebih banyak mendapatkan rezeki misal makanan sekaligus menghabiskannya. Tentunya pada saat dulu, ia dan istrinya bekerja lebih giat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Baru setelah akhir-akhir ini, Daryanto tertimpa musibah sakit paru-paru sehingga ia tidak bisa bekerja terlalu lelah. Hal ini juga ia anggap sebagai takdir yang harus dijalani. Untungnya, anak yang besar telah bekerja, sehingga sedikit-sedikit bisa membantu biaya sekolah adik-adiknya.

Margiono, juga menyatakan bahwa ia percaya bahwa kondisi kesusahan dalam kehidupannya sebagai bagian dari garis takdir karena ia juga telah berusaha tetapi memang hasilnya seperti ini. Termasuk dia masih mempunyai tanggungan untuk merawat ayahnya yang sakit jantung sehingga dia harus menyisihkan penghasilannya yang terbatas untuk menebus obat sebesar Rp 75.000 setiap bulan, karena obat itu tidak ditanggung oleh BPJS. Daryanto, salah seorang informan juga menyatakan "Ya mau bagaimana lagi mas. Yang memang keadaannya seperti ini. Kalau dibilang nrimo ing pandum ya seperti itu." (Wawancara pada 9 September 2017). Dalam kondisi usianya yang sudah 52 tahun, ia bersama istrinya yang berusia 50 tahun, sudah 37 tahun berjuang keras memenuhi kebutuhan keluarga dengan 8 orang anak-anaknya.

Bahkan secara psikologis dalam jangka panjang, masyarakat miskin masih sering merasa adanya ketenangan dan kebahagiaan, daripada merasakan dampak negatif misal perasaan sedih, malu hingga depresi atas kondisi ini. Masyarakat, khususnya generasi tua dan lansia menilai kondisi kemiskinan yang mereka hadapi saat ini dinilai lebih baik dan lebih mudah dibandingkan dengan kondisi kemiskinan yang

dihadapi oleh mereka. Terutama dalam hal pendidikan yang ditamatkan, konsumsi sehari-hari, dan akses transportasi di desa mereka.

"Kondisi dalam hal pangan sudah meningkat, saya sudah mengalami hidup sejak tahun 1945. Sejak jaman kecil saya, makan itu susah, makan nasi hanya saat jagong (pesta perkawinan). Pada jaman Pak Harto, setiap desa mendapat petugas penyuluh dan program menanam IR 36 sehingga bisa labuh (menanam) dua kali setahun, sebelumnya cuma satu kali setahun. Baju hanya mempunyai baju satu tetapi warnanya tujuh karena dijahit, ditambah sana sini. Jalan juga sudah lebih banyak yang bagus, dulu masih tanah" (Ratno, FGD 23 September 2017).

Tidak jauh berbeda dengan pendapat ibu Warsinah, menurutnya kondisi keluarganya sudah lebih baik. Dulu ia dan saudara-saudaranya atau teman-teman sebayanya, hanya sekolah sampai SD atau malah tidak tamat SD, hanya sebagian anak laki-laki yang berkesempatan sampai tamat SMP. Tetapi anak yang sekolah dan tamat SMA jarang sekali. Saat ini, anak-anaknya dan anak-anak tetangga di sekitarnya umumnya sudah bisa sekolah sampai SMK. Karena itu juga, sekarang anak-anak mereka sudah bekerja dan bisa turut membantu ekonomi keluarga seperti memberikan uang saku untuk anak yang masih sekolah. Begitu juga dengan cerita dari Ngatijo, seorang kepala rumah tangga miskin yang mempunyai profesi *candak kulak* dan istrinya membuka warung di *Green Village* Gedangsari. Meskipun masih tergolong miskin di lingkungan masyarakat, tetapi ia merasa bahwa kondisi kesejahteraannya membaik dibandingkan kondisi orang tua dan kondisi keluarganya tahun-tahun sebelumnya.

Namun, bagi keluarga miskin generasi muda dan para remaja mempunyai pandangan yang berbeda. Walaupun setuju adanya kemajuan dalam hal transportasi dan pendidikan tetapi menurut mereka kondisi hari ini tidak lebih baik. Sebabnya ialah kondisi saat ini serba kesulitan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Secara pendapatan, tanah pertanian adalah salah satu harta yang diwariskan kepada anak-anaknya. Para keluarga muda ini menyadari bahwa tanah garapan mereka yang didapatkan dari warisan tidak seluas dengan generasi orang

tua mereka sehingga hasilnya lebih sedikit. Tanaman kayu yang bisa diambil untuk dijual juga semakin susah didapatkan. Sementara, untuk mencari pekerjaan semakin susah karena mereka tidak mempunyai pendidikan yang tinggi dan keterampilan memadai selain bertani dan tenaga untuk pekerjaan bangunan.

Dari sisi pengeluaran, menurut Yatno, kebutuhan barang sehari-hari dan standar kehidupan saat ini semakin meningkat. Dulu jaman ia masih kecil sekolah cukup dengan jalan kaki dan tanpa keharusan uang saku, tetapi anak sekarang setiap sekolah umumnya meminta uang saku. Jika sekolahnya jauh, para orang tua berupaya menyediakan kendaraan sepeda motor tersendiri bagi anaknya ke sekolah. Akhirnya, bertambah biaya pengeluaran keluarga untuk membeli bahan bakar minyak (BBM).

Dari sisi kedua seperti inilah, masyarakat miskin mempunyai tidak ingin selalu dalam kondisi miskin, menolak menjadi miskin dalam hal materi, sesekali muncul rasa tidak bahagia khususnya tertekan (*stress*) ketika terdapat kebutuhan yang mendesak harus dicukupi seperti anak masuk sekolah, menyelenggarakan hajatan sendiri, atau menyumbang kegiatan hajatan utamanya *tarub* (pesta perkawinan).

Kesimpulan

Masyarakat miskin memaknai kehidupan yang baik/kesejahteraan (*wellbeing*) tidak secara tunggal dan tidak dalam hal material/ekonomi semata, melainkan jamak (setidaknya ada tiga makna) dan bersifat gradual. Mulai dari yang utama yaitu kondisi fisik yang sehat, lalu mampu *srawung* dan *guyub rukun* dengan seluruh warga masyarakat dan terakhir memiliki kecukupan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar utamanya kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan yang dipentingkan bagi masyarakat miskin pada sisi kontinuitas dan kuantitas, bukan kualitas.

Konsep masyarakat miskin terhadap kemiskinan, secara sederhana pada umumnya mereka mengasosiasikan kepada konsep *gadhah* (*kaya*)/*cekap* (*cukup*) dan *mboten gadhah* (*miskin*)/*kirang* (*kekurangan*). Definisi dari *gadhah* ialah rumah tangga yang memiliki sendiri ternak khususnya sapi lebih dari empat ekor, mempunyai lahan pertanian sendiri yang luas (hasil sekali panen mencapai 10 sak gabah atau 250 kg beras atau lebih) dan bangunan rumah yang bagus secara material konstruksinya

(berdinding tembok sudah *diplester*, lantai keramik, mempunyai kamar mandi sendiri dengan kloset leher angsa, beratap rumah dari genteng cetak/*press*). Namun demikian, konsep *gadhah* (*kaya*) dan *mboten gadhah* (*miskin*) itu bukan suatu istilah yang muncul dalam keseharian pergaulan mereka. Karena itu, konsep ini tidak memunculkan sebuah perbedaan dan ketimpangan yang nyata antar kelas miskin dan *kaya* di masyarakat.

Terdapat dualisme atas pandangan masyarakat miskin terhadap kemiskinan yang dihadapi sehari-hari. Di satu sisi, kemiskinan sebagai sesuatu yang sudah menjadi bagian kehidupan mereka sehingga mereka bisa memaklumi dan terima. Dalam hal ini, terdapat sisi penerimaan atau kepasrahan dalam keyakinan mereka sebagaimana dalam falsafah budaya Jawa "*nrimo ing pandum*" atau dalam keyakinan sebagai pemeluk agama islam sebagai garis takdir. Dengan alasan seperti sudah menjalani sejak kecil, sudah mencoba memikirkan tetapi tidak tahu caranya berubah, telah berusaha dan bekerja keras, serta mereka masih merasakan adanya ketenangan dan kebahagiaan batin dalam kehidupan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan daripada perasaan ketidak-bahagiaaan dan kemiskinan dalam hal materi. Di sisi yang lain, secara bersamaan juga terdapat sisi ketidakpuasan atau penolakan atas kondisi kekurangan seperti ini atau harapan atau keinginan untuk mempunyai kondisi yang lebih baik secara materi.

Sehingga wajar, dalam wacana perkembangan kemiskinan ini, kemiskinan tergolong bersifat dinamis. Terdapat pandangan terjadi polarisasi pada masyarakat generasi tua dan generasi muda. Para orang tua menyatakan bahwa kondisi hari ini lebih baik dan lebih mudah dibanding zaman dulu ketika mereka masih kecil. Sebaliknya, bagi para keluarga muda dan remaja menganggap bahwa kondisi hari ini tidak lebih baik karena pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup meningkat sementara lahan pertanian yang mereka garap semakin kecil dibanding orang tua mereka dan lapangan pekerjaan juga semakin susah.

Kondisi kemiskinan yang dihadapi warga masyarakat juga bersifat lokal. Beberapa faktor terkait kemiskinan, perilaku berhutang masyarakat miskin, keyakinan menyelenggarakan berbagai hajatan, kesadaran/

keyakinan untuk mengikuti Keluarga Berencana (KB) berbeda antar dusun. Dengan demikian, makna kesejahteraan dan ukuran kemiskinan dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep kesejahteraan yang diukur oleh struktur (pemerintah) yaitu kecukupan kebutuhan dasar makanan dan non makanan serta kepemilikan aset dan bersifat seragam secara nasional

Acknowledgement

Artikel ini merupakan hasil penulisan ringkas tesis penulis yang telah diuji dan dinyatakan lulus untuk meraih gelas Master of Arts dari Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018.

Referensi

- Agyarko, R. D. (2002). Influencing Policy through Participatory Poverty Assessments: A theoretical and Practical Overview and Assessment of a Changing Process. *Social Change*, 32, 81-98.
- Alkire, S. & Foster, J. (2016). *Multidimensional Poverty Index Country Briefing Series-Indonesia*. Oxford: Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI).
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota 2014*. Jakarta:Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik.(2016). *Statistik Indonesia 2015*. Jakarta: BPS.
- Carmon, N. (1985). Poverty and Culture: Empirical Evidence and Implications for Public Policy. *Sociological Perspectives*, 403-417.
- Chamber, R. (2012). Voices of the Poor' and Beyond: Lessons dari the Past,Agenda for the Future. *60th Dies Natalis International Institute of Social Studies*.Rotterdam: ISS Erasmus.
- Coward, B. E., Feagin, J. R., Williams, J. A., & Junior. (1974). The Culture of Poverty Debate: Some Additional Data. *Social Problems*, 621-634.
- Davidson, J. D. (1985). Theories and Measures of Poverty: Toward A Holistic Approach. *Sociological Focus*, 18, 177-198.
- Dhongde, S., & Minoiu, C. (2010). Global Poverty Estimates: Present and Future. *Brooks World Poverty Institute*, 1-30
- Harvey, D. L., & Reed, M. (1992). Paradigms of Poverty: A Critical Assessment of Contemporary Perspectives. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 269-297.
- Hidayana, I., & Nurhadi (2018). *Analisis Realitas Kemiskinan Kultural di Wilayah Perdesaan*. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Kwadzo, M. (2015). Choosing Concepts and Measurements of Poverty: A Comparison of Three Major Poverty Approaches. *Journal of Poverty*, 409-423.
- Laderchi, C. R., Saith R., & Stewart Frances. (2003). *Does it matter that we don't agree on the definition of poverty? A comparison of four approaches*. Oxford: Queen Elizabeth House, University of Oxford.
- Lewis, O. (1959). *Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*. Terjemahan. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Narayan D., Patel R., Schafft K., Rademacher, A., Koch-Schulte S. (2000). *Voices of the Poor- Can Anyone Hear Us? New York: World Bank*
- Norton, A., Bird, B., Brock, K., Turk, C., & Kakande, M. (2001). *Participatory Poverty Assessment: An introduction to theory and practice*. London: Overseas Development Institute.
- Ravallion, M. (2003). The Debate on Globalization, Poverty and Inequality: Why Measurement Matters. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944)*, 79, 739-753.
- Raza, A., Murad, H. S., & Zakar, M. Z. (2016). Contextualizing Poverty and Culture; towards a Social Economy Community Center Knowledge Based Development. *International Journal of Social Economics*, 486-501.
- Small, M. L., Harding, D. J., & Lamont, M. (2010). Reconsidering Culture and Poverty. *The Annals of The American Academy*, 6-27.
- World Bank. (2000). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. New York: World Bank.